

Matinya Ilmu Sosial di Indonesia: Indigenisasi Reflektif-Emansipatif

Ucu Martanto*

Abstrak

Meskipun mengalami pasang-surut, perdebatan tentang indigenisasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia merupakan salah peminatan yang cukup serius pada dekade 90-an. Kegelisahan ilmuan sosial terhadap kebijakan-kebijakan publik yang mengadopsi mentah-mentah teori-teori Barat menemukan pembenarannya ketika masyarakat Indonesia "gagal" dalam meraih kesejahteraan yang selalu dipromosikan oleh teori-teori tersebut. Tulisan ini bersepakat jika melakukan indigenisasi ilmu sosial (teori-teori sosial) menjadi kebutuhan urgent, namun pertanyaan kritis yang harus didiskusikan adalah melalui cara bagaimana indigenisasi dilakukan. Pada titik ini, indigenisasi reflektif-emansipatif yang menurut penulis perlu dijadikan basis bagi proyek-proyek politik, ekonomi, dan budaya kebangsaan demi mewujudkan "menjadi Indonesia".

Kata-kata kunci: ilmuan sosial, ilmu sosial, indigenisasi, reflektif-emansipatif

Pengantar

Idealisme para ilmuan sosial di Indonesia adalah mengakarkan teori-teori Ilmu Sosial dari fakta empiris di masyarakat sendiri atau indigenisasi ilmu-ilmu sosial. Untuk melakukannya seorang ilmuan harus dapat mensiasati perangkat 'ideologi', sistem kekuasaan, dan metodologi mapan yang lahir dari fakta empiris dan sejarah masyarakat Barat. Ini bukanlah sebuah kemustahilan. Sebab, beberapa ilmuan sosial dengan gemilang telah melakukan terobosan indigenisasi ilmu-ilmu sosial melalui karya-karya monumental bagi peletakan pondasi keilmuan sosial yang berurat-akar dari masyarakat Indonesia. Tidak berlebihan jika saya menyebut nama-nama antara lain: Prof Sajogyo, Prof. Selo Soemardjan, Prof. Soediono Tjondronegoro, Prof. Harsya Bachtiar, Prof. Mubyarto, Prof. Mochtar Buchori, Prof. Mochtar Kusuma Atmaja, dan Prof. Sartono Kartodirdjo yang terbilang telah menghasilkan temuan yang sangat empirik dan relevan.

Tulisan ini tidak mengupas karya-karya besar ilmuan sosial di atas, tetapi melacak aral-aral yang menjadi pembatas ruang dialektika para ilmuan sosial di Indonesia dalam melakukan indigenisasi. Untuk itu, pembahasan akan lebih menitikberatkan pada dua domain yang menurut penulis penting untuk didiskusikan,

yaitu ilmuan sosial dan ilmu sosial itu sendiri.

Sebelum memulai pengembaraan ini, saya perlu membatasi konsep indigenisasi agar tidak terjadi kejumuhan dalam mengartikannya. Meskipun banyak teori-teori yang dihasilkan oleh ilmuan sosial berangkat dari fakta empiris masyarakat Indonesia, namun tidak berarti semua karya-karya tersebut menunjuk konsep indigenisasi. Kita harus berhati-hati untuk menyimpulkan demikian, karena harus dibedakan antara "indigenisasi dan "nativisasi". Menurut Alatas (1993) "Nativisasi" merupakan sebuah konsep yang menunjuk pada anti tesis dari proses hegemoni Barat.

Istilah indigenisasi ilmu sosial ibarat karet gelang. Semakin ditarik, semakin memanjang. Sekadar contoh, Alatas (1993) menawarkan ilmu sosial Islam untuk indigenisasi ilmu sosial di Dunia Ketiga. Said (1978) mengajukan tawaran pengembangan ilmu sosial minus *colonial scholarship* dan *orientalist discourse*. Gardono (1998) menawarkan gagasan indigenisasi sebagai informasi ilmiah – informasi yang dilandaskan pada kenyataan sosial dan diperoleh melalui metodologi ilmiah. Indigenisasi menurut Kleden (1987; 1995) pengembangan ilmu sosial sebagai ilmu tentang masyarakat daripada ilmu untuk kepentingan negara. Samuel (2000) memandang indigenisasi ilmu sosial sebagai ilmu dan institusi keilmuan yang *semi autonomous*. Dalam tulisan ini,

* Staf Pengajar Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

indigenisasi saya tarik dari konsep yang ketat. Oleh karenanya, penegasan yang terkandung didalamnya bukan hanya perlu atau tidaknya indigenisasi ilmu sosial di Indonesia tetapi indigenisasi macam apa yang diperlukan oleh ilmuan sosial kita.

Mengapa indigenisasi Ilmu Sosial di Indonesia diperlukan. Setidaknya ada tiga alasan. *Pertama*, Ilmu-Ilmu Sosial di Negara Berkembang berawal dari Barat sehingga kerangka teoritis, prinsip metodologi, pengetahuan atas pengetahuan yang dibentuk di sana belum tentu sejalan dengan di Indonesia. *Kedua*, ilmu pengetahuan selalu mencari bentuk praksisnya yang tidak hanya berbicara tentang pentingnya konteks tetapi juga tidak lepas dari pengaruh ideologi. *Ketiga*, teori-teori yang lahir dalam konteks masyarakat Barat memiliki keterbatasan daya-penjelasan dalam konteks masyarakat Indonesia. Selama teori dibangun dari masyarakat maka teori yang ada akan selalu memuat kekosongan jika digunakan pada konteks yang berbeda.¹

Bebalisme Ilmuan Sosial

Mengutip Selo Sumardjan, *bahwa di antara para sarjana ilmu-ilmu sosial kita sampai sekarang masih sedikit yang memperhatikan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dari masyarakat Indonesia sendiri, artinya mencari bahan-bahan dari masyarakat kita sendiri untuk membangun teori-teori yang berakar pada masyarakat kita sendiri* (Prisma No. 3/1993). Kegelisahan ini, setidaknya, juga pernah diungkapkan pada Dies Natalis Fisipol UGM tahun 2002 lalu.² Untuk hal ini, saya melihat salah satu penyebab kelangkaan proyek-proyek indigenisasi ilmu sosial disebabkan ilmuan sosial kita sedang terjangkit penyakit 'bebalisme'.³

Istilah bebalisme diperkenalkan Alatas (1988) untuk menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai daya antisipasi. Biasanya, para bebalis hanya bereaksi terhadap suatu peristiwa setelah kejadian – mereka akan membuka payung hanya

sesudah hujan membasahi tubuhnya. Bebalis adalah orang yang otoriter (cepat-cepat menarik generalisasi), tidak reflektif dan tidak mendasarkan pada eksperimen. Bebalisme memandang peristiwa dan gejala dalam pengertian logikanya sendiri, tanpa pengembangan yang suksesif. Bebalisme tidak mempunyai kecintaan kepada argumentasi yang tertib dan rasional serta tidak menaruh penghargaan kepadanya. Bebalisme tidak memiliki kemampuan untuk menilai masalah secara kontekstual, mendalam, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, bebalisme tidak orisinal atau kreatif sehingga tidak mengembangkan rasionalitas substansial maupun fungsionalnya. Celaknya, bebalisme ini ditemukan dalam penampilan yang kolektif.

Bebal sama dengan kebodohan namun dengan karakter yang berbeda. Mengikuti Žižek (2012), terdapat dua tipe kebodohan yang berlawanan. Tipe pertama adalah kebodohan yang disebabkan oleh keterbelakangan mental. Mengikuti kategori dalam psikologi, keterbelakangan/kecerdasan biasa diukur melalui pengujian dan pengklasifikasian berdasarkan IQ (*Intelligence Quotient*). Kecerdasan adalah kemampuan untuk mempelajari, memahami, berurusan dengan situasi yang baru atau setidaknya berusaha menghadapi berbagai situasi. Dengan demikian kecerdasan adalah kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan akal. Definisi keterbelakangan akan berpunggunan dengan kecerdasan. Dalam kategori keterbelakangan mental berdasarkan IQ, termuat klasifikasi: *idiot* IQ (0-25), *imbecile* IQ (20-49), *moron* IQ (50-69), dan batas keterbelakangan IQ (70-80). Kebodohan yang kita diskusikan berada pada kategori *moron*. *Moron* adalah terma psikologi masuk dalam kategori keterbelakangan ringan atau dalam definisi Žižek (2012), *who fully identify with common sense, who fully stand for the "big Other"*⁴ appearances. Ini berbeda dengan idiot yang berdiri sendiri berada di luar "*big Other*", *moron* berada di dalam "*big Other*" sementara *imbecile* berposisi di antara *idiot*

¹*La théorie, rest bon, mais ça n'empêche pas d'exister* (Theory is good, but it doesn't prevent [facts which do not fit it] from existing)

²Pada seminar Dies Natalis ke-47 Fisipol UGM, kegelisan serupa diungkapkan saat mencermati perkembangan ilmu-ilmu sosial umumnya dan intelektual Fisipol UGM khususnya, yang justru mengalami involusi (Santoso, 2002). Penyebabnya karena bias intelektual Ilmu Sosial kita, yaitu bias elit dan negara.

³Kalau boleh disebut penyakit, sebenarnya endemiknya bukan hanya diidap ilmuan tetapi juga masyarakat, politisi, dan birokrat; bukan hanya dunia ketiga tetapi juga dunia pertama; bukan hanya masyarakat agraris tetapi juga masyarakat industri. Singkatnya, bebalisme ada di semua kebudayaan, semua ruang dan waktu.

⁴Makna '*big Other*' selain dapat ditelusuri secara spesifik dalam tulisan Žižek (2012) ataupun Žižek tentang "*between-the-two-frame*" (1999) juga dalam tulisan Lacan (1994) yang dikutip oleh Žižek (2012) tentang *symbolic order*, agensi yang menggagalkan (menunda) keseluruhan domain 'kehidupan'. '*big Other*' adalah agensi/subjek yang oleh seseorang dinanti keberadaannya, yang seharusnya mengetahui sekaligus menentukan

dan *moron*. Kebodohan yang serupa dengan bebal adalah seseorang dengan tingkat kecerdasan tinggi namun tidak “nyambung”. Seseorang yang mengerti dan paham situasi secara logis, akan tetapi tidak menyadari keberadaan aturan-aturan kontesktual yang tersembunyi.

Ilmuan sosial bebalis biasanya mengambil konsep yang dikembangkan di Barat dan menempelkannya kepada masyarakat Indonesia secara *sembrono*. Contohnya, banyak kajian-kajian deskriptif-analitis tentang perubahan sosial pada masyarakat maju kerap diimpor ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Oleh sebagian ilmuan, kajian tersebut dianggap sebagai ‘barang’ siap pakai. Di Indonesia, walaupun kajian tersebut dianggap sebagai bahan tiga perempat jadi, yang mengalami proses kontekstualisasi, namun praktisnya kajian-kajian tersebut tetap menjadi rumusan preskriptif (Hoogvelt 1981; Suwarsono dan So 1991; Samuel 2003a). Temuan ilmiah di Barat dianggap sebagai *panacea* bahkan kepastian dan cita-cita yang layak dicapai. Kecenderungan ini terefleksi utuh dalam sejarah Indonesia modern.

Sekadar contoh, keberhasilan pembangunan ekonomi Orde Baru disangga oleh kekuatan teori-teori modernisme yang dilansir oleh ilmuan Barat. Diktum pertumbuhan ekonomi adalah keniscayaan bagi demokrasi menjadi ‘ideologi’ pemerintah. Ilmu-ilmu sosial pun dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Sosiologi diproyeksikan untuk mengatasi halangan struktural masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ilmu Politik digunakan untuk mentransformasikan lembaga-lembaga politik agar sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Hasilnya masyarakat menjadi ahistoris, apolitis dan asosial. *Boro-boro* mengharapkan tegaknya demokrasi, pertumbuhan ekonomi nasional pun tidak berhasil mengangkat perekonomian seluruh masyarakat Indonesia. Di lain pihak, ilmu-ilmu sosial dan ilmuan sosial yang berubah menjadi mesin kekuasaan, etikanya turut bertanggungjawab terhadap ekseseks negatif pembangunan, justru terombang-ambing mengikuti trend keilmuan Barat.

Orde Baru runtuh seiring meluasnya kritik terhadap pembangunanisme. Gagasan *market reign-state decline* yang dilokomotif oleh lembaga-lembaga donor dunia pada era akhir 1990-an menjadi paradigma baru yang meruntuhkan modernisme. Globalisasi, yang mampu memadatkan ruang dan waktu, membawa gerbong-gerbong ini ke dunia ketiga, termasuk Indonesia, dalam bentuk konsep yang generik, seperti *good governance*. Bak menemukan ‘Tuhan’ baru, *good*

governance kini mendominasi wacana ilmuan sosial dan masyarakat Indonesia. Sampai-sampai analisa-analisa fenomena sosial dan politik bahkan budaya selalu berkiblat pada prinsip *good governance*. Namun, sayangnya, belum ada ilmuan sosial kita yang dengan serius dan konsisten mengkaji secara kritis konsep *good governance*. Alih-alih mendorong demokrasi sejati, jangan-jangan *good governance* akan serupa dengan konsep pembangunanisme yang hanya banyak menemukan kegagalan.

Kalau kita menarik kembali istilah bebalisme ke dalam wilayah filosofis, bebalisme sangat berhubungan kesadaran kognitif yang membentuk kapasitas refleksi ilmuan sosial kita. Keterbuaian mereka dengan logika pengetahuan Barat – yang didominasi oleh pendekatan positivisme dan saintisme – membuat daya refleksi menjadi tumpul. Karena positivisme dan saintisme adalah sistem tertutup maka wajarlah ketika mereka menempatkan masyarakat sebagai obyek pengetahuan dan keilmuan. Dengan demikian, yang terjadi bukan intersubjektivitas melainkan subjektivikasi ilmuan sosial terhadap objek. Logika seperti ini, akan berakibat pada pembentukan teori yang tidak emansipatif, teori menjadi terpisah dengan *praxis*. Kondisi ini menyebabkan teori-teori ilmu sosial tidak berhasil membebaskan masyarakat Indonesia malahan justru membelenggu.

Refleksi dan Emansipasi

Filsafat Kant memberikan idealisme dalam memahami pengetahuan dan ilmu pengetahuan dengan kapasitas rasio. Sehingga pengetahuan dan ilmu pengetahuan haruslah mencerahkan umat manusia. Jika jaman *renaissance* pengetahuan dan ilmu pengetahuan membebaskan manusia dari perkara metafisis melalui rasionalitas teknis dengan kemampuan empiris-analitis, maka pada jaman modern membebaskan manusia dari belenggu ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi ‘idiologis’ melalui kapasitas refleksi-diri. Hal ini digambarkan dengan baik oleh Habermas. Menurutnya, jika di dalam sistem kapitalis liberal kerangka kerja institusional didepolitisasikan, dalam sistem kapitalisme lanjut justru mengalami repolitisasi, sehingga politik tidak lagi menjadi fenomena superstruktur (Hardiman, 1990:95).

Dengan bertambah besarnya peranan negara dalam masyarakat, legitimasi tak lagi dapat diberikan oleh tatanan hubungan-hubungan produksi sehingga dalam arti tertentu masyarakat membutuhkan legitimasi langsung dari kekuasaan politis seperti pada jaman pra-kapitalis. Akan tetapi

berbeda dari legitimasi kekuasaan tradisional, kekuasaan masyarakat kapitalisme lanjut ditentukan oleh *tujuan-tujuan teknis*, yaitu pemecahan masalah-masalah teknis ekonomi masyarakat. Di dalam hal-hal teknis itu, massa tidak diikutsertakan sehingga repolitisasi masyarakat juga menghasilkan *depolitisasi massa*. Bersamaan dengan itu, masalah-masalah etis-praktis lenyap dalam pengaturan masyarakat. Lenyapnya fungsi politis massa dalam masyarakat kapitalis lanjut dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri (hegemonik) karena kekuasaan politis mendasarkan dirinya pada legitimasi teknokratis di mana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ideologi. Dalam konteks ini, saintisme dan positivisme modern di lapangan intelektual menggantikan mitos-mitos prakapitalis dan ideologi kebebasan kaum borjuasi.

Ilmuan sosial harus mampu menggunakan kemampuan refleksi-diri dan mempertautkan antara teori dan *praxis* sehingga keluar dari belenggu 'ideologis' ilmu pengetahuan dan dengan daya refleksi-diri ini dapat menghasilkan ilmu sosial yang emansipatif. Untuk itu, dalam mengindigenisasi-kan ilmu-ilmu sosial, ilmuan ditantang tidak hanya mampu memproduksi teori-teori empiris semata, tetapi juga teori-teori mampu keluar dari perangkat posistivisme atau saintisme. Mengapa? Untuk menjawabnya, saya akan berangkat dari sifat positivisme dan saintisme.

Sikap positivisme dan saintisme yang dianut oleh ilmu-ilmu sosial mengandung tiga pengandaian yang saling berkaitan. 1) bahwa prosedur-prosedur metodologi dari ilmu-ilmu alam dapat langsung diterapkan pada ilmu-ilmu sosial. Gejala-gejala subjektivisme manusia, kepentingan maupun kehendak manusiawi, tidak mengganggu objek

pengamatan, yaitu tingkah laku sosial manusia. Dengan cara ini obyek pengamatan disejajarkan dengan dunia alamiah. 2) hasil-hasil penelitian itu dapat dirumuskan dalam bentuk 'hukum-hukum' seperti dalam ilmu-ilmu alam. 3) ilmu-ilmu sosial itu harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni. Pengetahuan itu harus dapat dipakai untuk keperluan apa saja sehingga tidak bersifat etis dan tidak terkait pada dimensi politis manusia. Ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam, bersifat netral dan bebas nilai (Hardiman, 1990:24).

Cara berpikir posistivis dan saintisme menyebabkan rasionalitas subjek berkembang dalam sistem tertutup. Sikap subjek hanya menerima fenomena-fenomena inderawi yang layak untuk diteliti dengan menggunakan aturan logika positif sehingga menjadi bebas nilai. Padahal dalam ilmu sosial, objek kajian tidak hanya dalam tangkapan inderawi. Karena cara berpikir posistivisme yang bebas-nilai ini, maka ia tidak peka terhadap adanya pertautan antara pengetahuan dan kepentingan. Padahal manusia sebagai spesies berasio memiliki kepentingan emansipatoris untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan ideologis melalui perantaraan kekuasaan. Kepentingan ini mewujudkan dirinya dalam pengetahuan analitis yang disistematisasikan secara metodis menjadi ilmu-ilmu sosial kritis. Konsep ini berbeda dengan ilmu-ilmu historis-hermeneutis yang bertolak pada pengetahuan interpretatif dan kepentingan praktis.

Kalau dibandingkan dengan dua kepentingan sebelumnya (kepentingan teknis dalam ilmu empiris-analitis dan kepentingan praktis dalam ilmu historis-hermeneutis), kepentingan emansipatoris bersifat derivatif dan mendasar. Jika

	Ilmu-Ilmu Empiris-Analitis (ilmu-ilmu pengetahuan alam)	Ilmu-Ilmu Historis-Hermeneutis (ilmu-ilmu sosial-budaya)	Ilmu-Ilmu Kritis
Kepentingan Pengetahuan Tindakan Metodologi	Teknis Informasi Tindakan rasional-bertujuan Empiris-analitis	Praktis interpretasi Tindakan komunikatif Historis-hermeneutis	emansipatoris analisis Tindakan revolusioner-emansipatoris Refleksi-diri

Sumber: Hardiman (1990:193) diambil dari Habermas (1971)

⁶ Kesimpulan sintesis tidak memberikan jawaban final tentang kenyataan, tetapi keduanya menghasilkan pengertian-pengertian baru tentang kenyataan

kita merefleksikan dua bentuk pengetahuan ilmiah yang dibimbing oleh kepentingan teknis dan praktis, kita akan menyadari bahwa kedua bentuk pengetahuan itu dihasilkan oleh rasio yang berkehendak untuk membebaskan diri dari kendala-kendala alamiah (kerja) dan kendala-kendala interaksi sosial (interaksi) (Hardiman, 1990:164-165). Dalam arti ini kepentingan teknis dan praktis diturunkan dari kepentingan emansipatoris (lihat matrik). Pada saat pernyataan-pernyataan teoritis yang dihasilkan oleh kepentingan teknis dan praktis itu membeku menjadi ideologi, kepentingan emansipatoris membimbing refleksi-diri untuk menghancurkan dogmatisme dan ideologi dalam berbagai perwujudannya.

Masalah selanjutnya yang dihadapi ilmuan sosial dalam mengindigenisasikan ilmu sosial adalah soal keilmiahan. Di wilayah ini kita akan berbicara metodologi dalam indigenisasi ilmu sosial. Pertanyaannya, apakah metodologi juga diindigenisasikan?

Sukses teori-teori ilmu-ilmu alam dalam memprediksi, memanipulasi atau mendayagunakan gejala-gejala alamiah mendorong para pemikir tentang gejala-gejala sosial kemanusiaan untuk menerapkan metode yang sama pada ilmu-ilmu sosial-budaya dan inilah yang dilakukan para positivis. Jika penarikan kesimpulan positivis cenderung deduktif-induktif, maka ilmu pengetahuan kritis menarik kesimpulan yang bersifat sintesis⁵ (induktif dan abduktif) dalam bingkai dialektis yang mengarah ke masa depan atau apa yang disebut dialektika terbuka. Metode dialektika ini mencari kontradiksi-kontradiksi di dalam kenyataan konkret. Dialektika yang diinspirasi oleh refleksi-diri inilah yang menjadi cara lain untuk mencari kesahihan sebuah pengetahuan.

Filsuf Amerika, Charles Sanders Peirce membedakan tiga bentuk kesimpulan, yaitu deduksi, induksi, dan abduksi. Jika suatu kesimpulan membuktikan bahwa sesuatu harus berjalan dengan cara tertentu, kesimpulan ini disebut deduksi. Jika suatu kesimpulan menunjukkan bahwa sesuatu nyatanya berjalan menurut cara tertentu, kesimpulan ini disebut induksi. Dan, kalau suatu kesimpulan membuktikan bahwa sesuatu mungkin akan berjalan dengan cara tertentu kesimpulan ini disebut abduksi. Penarikan kesimpulan abduksi mengikuti logika *sufficient (or nearly sufficient) but not necessary*. Pengenalan abduksi oleh Peirce sebagai sesuatu yang memisahkan dirinya dari positivisme awal

(Comte dan Mach) dan positivisme modern (positivisme logis). Bagi Habermas, Peirce berbeda karena pemahamannya bahwa tugas metodologi bukanlah menjernihkan struktur logis teori-teori ilmiah melainkan menjernihkan logika prosedur untuk memperoleh teori ilmiah tersebut.

Dalam banyak tulisan Adorno dan pengikut Mazhab Frankfurt, metode dialektik ini diperlawankan dengan pemikiran identitas. Bagi Teori Tradisional, yaitu teori-teori yang bekerja pada pemikiran identitas, jika *a* benar, *non-a* pasti salah. Cara berpikir identitas adalah $a = a$ atau $a \neq non-a$. Pikiran hanya mencocokkan dirinya dengan fakta dan dengan cara ini fakta tetap teguh dan tidak berubah. Sebaliknya, Teori Kritis memakai pemikiran dialektis. Bagi Teori Kritis, kontradiksi *a* bukanlah *non-a*, melainkan *b, c, d*, dst. Dengan cara ini fakta dicurigai dan tidak dibiarkan. Teori bermaksud mengubah fakta, maka suatu identitas subjek dan objek tidak tercipta di masa kini melainkan di masa depan.

Pada akhir pengembaraan ini, bagi saya indigenisasi ilmu-ilmu sosial tidak hanya sebatas mengkontekstualisasikan fakta empiris, tapi juga mempergunakan logika berpikir kritis terhadap fakta-fakta empiris dalam membangun teori. Indigenisasi di sini tentunya bersyarat adanya dekonstruksi pemikiran ilmuan sosial dan ilmu sosial, yaitu indigenisasi yang reflektif dan emansipatif. Disadari bahwa untuk sampai ke sana banyak tantangan yang dihadapi, namun, sekali lagi, jalan ini bukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh ilmuan sosial kita. Semoga.

Bibliografi

- Alatas, Syed. Hussain. (1988). *Intelektual Masyarakat Berkembang*. LP3ES, Jakarta.
- (1993) *On the Indigenisation of Academic Discourse*, Alternatives 12 (1).
- Gardono, Iwan. (1998). *Indigenisasi Sosiologi di Indonesia*, Masyarakat Indonesia 20 (2).
- Hardiman, F. Budi. (1990) *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Hoogvelt, A.M.M. (1981) *The Sociology of Developing Societies*. London, MacMillan.
- Kleden, Ignas. (1987). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta.
- Salim, Agus. (2002). *Perubahan Sosial: Skesa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Tiara Wacana.

- Santoso, Purwo. (2002). *Potret Ilmu-Ilmu Sosial: Diambang Involusi*, Makalah dalam Dies Natalis Ke-47 Fisipol, UGM.
- Suwarsono dan A.Y. So. (1991) *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Said, E.W. (1978). *Orientalism: Western Conceptions of the Orient*. London: Penguin Books.
- Samuel, Hanneman. (2000) *The Development of Sociology in Indonesia: The Production of Knowledge, State Formation and Economic Change*. Tesis Ph.D. tidak diterbitkan. Swinburne: Swinburne University of Technology.
- (2003a) *Indonesian Social Sciences: Looking Back, Creating the Future*. A paper presented at the 'Regional Cooperation and Identity Building in East Asia in the Age of Post Cold War Globalisation: A Search for Institutional Frameworks in Political, Economic, Social, and Cultural Fields', organised by Korean Association for South East Asian Studies dan ASEAN University Network, the Philippines, 19-22 Feburari.
- Žižek, Slavoj (2012). *Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism*. Verso: London-New York.
- Žižek Slavoj (1999). *The Fright of the Real Tears*. London: BFI.
- Basis, Edisi 75 tahun Jürgen Haberman. No. 11-12 Desember 2004
- Jurnal Prisma No. 3/1993.